AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

# Analisis Penerapan Materialitas, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Laporan Keberlanjutan Berbasis *Global Reporting Initiative* PT Alamtri Mineral Indonesia Tbk 2025

**Intan Nur Lizsa[1], Lisa Rahmawati[2*], Agus Triyani[3]**
[1-3]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wahid Hasyim Semarang
*Email: [1]intannurlizsa3002@gmail.com, [2]rlisa7804@gmail.com, [3]agustriyani@unwahas.ac.id*

**Penulis Korespondensi: rlisa7804@gmail.com*

***Abstract****. This study aims to analyze the implementation of materiality, transparency, and accountability principles in the sustainability report based on the Global Reporting Initiative (GRI) of PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk in 2025. This research employed a qualitative descriptive method using a* content analysis *approach on the company's sustainability report based on GRI Standards 2021. The analysis was conducted through a disclosure checklist covering GRI 2 and GRI 3, GRI 200, GRI 300, and GRI 400 to evaluate the level of compliance with the applicable standards. The results show that the company disclosed 80 out of 117 indicators with a disclosure level of 68.38%, categorized as Partially Applied. The highest disclosure level was found in general disclosures and material topics, while the economic aspect showed the lowest disclosure level. In terms of materiality, the company has identified sustainability issues relevant to the mining sector. Transparency and accountability were also implemented through the disclosure of ESG strategies, corporate governance, and sustainability risk oversight, although several indicators were still not fully disclosed. This study contributes to evaluating the quality of sustainability reporting in the mining sector based on GRI Standards 2021.*

***Keywords****: Sustainability Report; Materiality; Transparency; Accountability; GRI Standards*

**Abstrak**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan berbasis Global Reporting Initiative (GRI) pada PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis* terhadap *sustainability report* perusahaan berdasarkan GRI Standards 2021. Analisis dilakukan melalui checklist pengungkapan pada GRI 2 dan GRI 3, GRI 200, GRI 300, serta GRI 400 untuk menilai tingkat kesesuaian laporan keberlanjutan dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan 80 dari 117 indikator dengan tingkat pengungkapan sebesar 68,38% sehingga termasuk dalam kategori *Partially Applied*. Tingkat pengungkapan tertinggi terdapat pada aspek pengungkapan umum dan topik material, sedangkan aspek ekonomi menunjukkan tingkat pengungkapan terendah. Pada aspek materialitas, perusahaan telah mengidentifikasi isu keberlanjutan yang relevan dengan sektor pertambangan. Transparansi dan akuntabilitas juga telah diterapkan melalui pengungkapan strategi ESG, tata kelola, dan pengawasan risiko keberlanjutan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum diungkapkan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam evaluasi kualitas *sustainability reporting* pada sektor pertambangan berbasis GRI Standards 2021.

**Kata kunci**: Laporan Keberlanjutan; Materialitas; Transparansi; Akuntabilitas; GRI Standards

## 1. LATAR BELAKANG

Dalam era bisnis modern, perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari kemampuannya menghasilkan laba, tetapi juga dari tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tata kelola yang dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan serta tuntutan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Investor, pemerintah,

*Naskah Masuk: 12 Maret 2026; Revisi: 13 April 2026; Diterima: 13 Mei 2026; Terbit: 20 Mei 2026*

masyarakat, konsumen, hingga lembaga internasional kini menjadikan aspek *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai indikator penting dalam menilai keberlangsungan perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham, manajemen, masyarakat, maupun lingkungan sekitar (Restu & Sungloria, 2022). Salah satu bentuk penyampaiannya adalah melalui *sustainability report*, yaitu laporan yang memuat informasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan secara transparan dan terstruktur sesuai standar yang berlaku (Faluvi et al., 2025).

*Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global karena menyediakan pedoman yang sistematis, fleksibel, dan relevan bagi berbagai sektor industri. GRI Standards 2021 menegaskan bahwa laporan keberlanjutan harus disusun berdasarkan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas agar informasi yang disampaikan relevan bagi pemangku kepentingan. Materialitas berfungsi untuk menentukan isu utama yang berdampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, sedangkan transparansi menekankan keterbukaan informasi yang jelas dan objektif, serta akuntabilitas menjadi dasar pertanggungjawaban perusahaan atas seluruh keputusan dan dampak operasionalnya. (GRI, 2024) juga menegaskan bahwa pada sektor pertambangan, penerapan prinsip materialitas menjadi lebih penting karena tingginya risiko lingkungan dan sosial seperti emisi karbon, limbah tambang, konflik lahan, keselamatan kerja, dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. (Yunita et al 2025)

Selain itu, regulasi di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan publik, khususnya emiten dan perusahaan besar, untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak lagi bersifat sukarela, tetapi telah menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan modern. (KPMG, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 90% perusahaan besar dunia telah menerbitkan *sustainability report*, dan sektor pertambangan termasuk salah satu sektor dengan tingkat tekanan tertinggi dalam pengungkapan ESG karena tingginya eksposur terhadap isu lingkungan dan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas *sustainability reporting* menjadi instrumen penting

dalam membangun legitimasi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan bisnis jangka panjang (Riu et al., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menentukan isu material, mengidentifikasi risiko keberlanjutan, serta menilai kualitas pengungkapan perusahaan. (Mahajan et al., 2023) menjelaskan bahwa stakeholder theory menempatkan perusahaan sebagai entitas yang harus menciptakan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, sehingga perusahaan perlu mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan, akurat, dan dapat dipahami. Sementara itu, (Martens et al., 2023) melalui *legitimacy theory* menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan legitimasi sosial agar dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya, dan *sustainability report* menjadi salah satu instrumen utama untuk memperoleh legitimasi tersebut melalui keterbukaan informasi sosial dan lingkungan. Penelitian (León & Salesa, 2024) juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara topik material yang seharusnya diungkapkan dengan informasi yang benar-benar disajikan dalam *sustainability report*, sehingga kualitas materialitas masih menjadi isu penting dalam pelaporan keberlanjutan.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (AMI) sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral memiliki tanggung jawab besar terhadap isu keberlanjutan karena aktivitas operasionalnya berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup, serta hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasional. Industri pertambangan merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, limbah B3, penggunaan energi yang tinggi, degradasi lahan, serta perubahan ekosistem di sekitar area tambang. Dalam Laporan Keberlanjutan 2025, AMI mengusung tema Advancing Growth with Responsibility and Discipline yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta keseimbangan antara ekspansi bisnis dan aspek ESG (AMI, 2025). Perusahaan juga menegaskan dukungannya terhadap target Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060 melalui strategi dekarbonisasi, efisiensi energi, pengelolaan emisi GRK, serta penguatan tata kelola keberlanjutan.

Selain itu, AMI menyatakan bahwa laporan keberlanjutan disusun sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan kinerja keberlanjutan secara transparan kepada seluruh

pemangku kepentingan, dengan data yang bersumber dari berbagai unit kerja internal serta mitra terkait berdasarkan standar pelaporan yang berlaku (AMI, 2025). Transparansi ini menjadi sangat penting karena kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan formal, tetapi melalui konsistensi antara komitmen, kebijakan, dan implementasi nyata di lapangan. (Haley et al., 2026) menemukan bahwa tidak seluruh *sustainability report* mengandung informasi yang benar-benar material secara finansial bagi investor, sehingga relevansi pengungkapan menjadi perhatian utama dalam evaluasi kualitas laporan keberlanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut relevan, material, dan mampu mencerminkan akuntabilitas perusahaan secara nyata.

Namun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada sektor consumer goods, energi, dan manufaktur, sedangkan kajian yang secara spesifik menghubungkan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas secara terintegrasi dalam analisis *sustainability report* perusahaan pertambangan berbasis GRI masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya menilai tingkat pengungkapan secara umum tanpa menelaah keterkaitan antara ketiga prinsip utama tersebut dalam konteks industri pertambangan yang memiliki karakteristik risiko lebih tinggi. Penelitian (Perdana et al., 2025) menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan, struktur tata kelola dan kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas *sustainability reporting*, namun belum secara spesifik membahas hubungan antara materialitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai satu kesatuan analisis.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penerapan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk berdasarkan GRI Standards 2021. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mengintegrasikan ketiga prinsip utama *sustainability reporting* dalam sektor pertambangan mineral, khususnya pada perusahaan yang secara aktif menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PT AMI telah menerapkan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam *sustainability report* tahun

2025, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *sustainability reporting* serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan di masa mendatang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Stakeholder

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memenuhi kepentingan internal atau memaksimalkan keuntungan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas operasionalnya. Menurut (Freeman, 1984) dalam (Mahajan et al., 2023), stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, seperti investor, karyawan, pemerintah, masyarakat, pelanggan, pemasok, dan komunitas sekitar. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi harapan sosial, lingkungan, dan ekonomi para pemangku kepentingan. Dalam konteks *sustainability report*, perusahaan perlu menyediakan informasi yang relevan, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh stakeholder karena mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan mereka (Hanafi et al., 2025). (Mahajan et al., 2023) juga menjelaskan bahwa pengungkapan keberlanjutan yang baik dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan stakeholder serta meningkatkan legitimasi sosial perusahaan ( Hastuti, 2025; Azis, 2025).

### Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat agar memperoleh penerimaan sosial dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Perusahaan pada dasarnya beroperasi berdasarkan kontrak sosial tidak tertulis dengan masyarakat, sehingga legitimasi menjadi aset penting yang harus dijaga melalui tindakan yang bertanggung jawab. (Martens et al., 2023) legitimasi merupakan persepsi masyarakat bahwa aktivitas perusahaan telah sesuai dengan sistem nilai sosial yang berlaku. Dalam konteks *sustainability report*, perusahaan menggunakan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai strategi untuk mempertahankan legitimasi, terutama ketika

menghadapi tekanan publik terkait isu lingkungan, konflik sosial, atau risiko operasional yang tinggi. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan dampak lingkungan secara transparan.

**Materialitas**

Materialitas dalam laporan keberlanjutan merupakan prinsip yang digunakan untuk menentukan isu-isu yang paling penting dan signifikan bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan. Prinsip ini membantu perusahaan memfokuskan pengungkapan pada aspek yang benar-benar memiliki dampak besar terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan sehingga laporan yang disusun tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki nilai informasi yang tinggi. (GRI, 2024) menempatkan materialitas sebagai salah satu prinsip utama dalam *sustainability reporting* melalui identifikasi topik yang paling relevan berdasarkan dampak perusahaan dan ekspektasi stakeholder. (León & Salesa, 2024) menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara topik material yang seharusnya diungkapkan dengan informasi yang benar-benar disajikan dalam laporan keberlanjutan, sehingga kualitas materialitas menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas *sustainability report*. Pada sektor pertambangan, isu material umumnya berkaitan dengan emisi karbon, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, konservasi energi, dan hubungan dengan masyarakat lokal.

**Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga kualitas informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam *sustainability report,* transparansi menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder. (Putera et al., 2026), transparansi berfungsi sebagai sarana pengawasan publik dan alat untuk memperkuat akuntabilitas organisasi, terutama pada sektor dengan risiko sosial dan lingkungan tinggi seperti pertambangan. Perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena dianggap lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya..

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial atas dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam *sustainability report*, akuntabilitas menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaporkan pencapaian positif, tetapi juga mengungkapkan tantangan, risiko, dan upaya perbaikan secara berkelanjutan. (Ika & Falikhtun, 2026), akuntabilitas mencerminkan proses pertanggungjawaban yang jujur, transparan, dan mudah dipahami publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Pada perusahaan pertambangan, akuntabilitas menjadi sangat penting karena aktivitas operasionalnya berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

***Global Reporting Initiative* (GRI)**

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi internasional yang menyediakan standar pelaporan keberlanjutan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. GRI menjadi standar pelaporan yang paling banyak digunakan karena menyediakan kerangka yang sistematis, fleksibel, dan dapat diterapkan pada berbagai sektor industri. GRI Standards terdiri atas GRI Universal Standards, GRI Sector Standards, dan GRI Topic Standards yang mencakup aspek ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400). GRI Universal Standards meliputi landasan, pengungkapan umum, dan topik material, sedangkan GRI Sector Standards memberikan panduan khusus sesuai karakteristik industri, termasuk pertambangan. (GRI, 2024) melalui GRI 14 Mining Sector menegaskan bahwa perusahaan pertambangan memerlukan standar pengungkapan yang lebih spesifik karena sektor ini memiliki risiko keberlanjutan yang lebih kompleks, seperti emisi GRK, limbah tambang, konflik sosial, dan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penerapan GRI Standards menjadi alat penting dalam menilai kualitas *sustainability reporting* dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang terjadi, dengan menekankan makna, proses, serta interpretasi data dalam bentuk narasi atau deskripsi kata-kata (Fiantika et al., 2022).

Objek penelitian ini adalah Laporan Keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk tahun 2025 yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian dan kesesuaiannya dengan Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen resmi perusahaan yang diperoleh dari Laporan Keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk tahun 2025 serta dokumen pendukung terkait kebijakan keberlanjutan perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan checklist berbasis GRI Standards 2021 untuk menganalisis penerapan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam Laporan Keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk tahun 2025. Metode analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data teks secara sistematis melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan identifikasi tema, baik secara induktif maupun deduktif, guna memperoleh makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Komor & Grzyb, 2023). Analisis pengungkapan dilakukan pada GRI 2, GRI 3, GRI 200, GRI 300, dan GRI 400 yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses analisis dilakukan melalui tahap pengkodean (*coding*), yaitu setiap indikator yang diungkapkan dalam laporan diberi skor 1, sedangkan indikator yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Selanjutnya, seluruh skor dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan membandingkan jumlah indikator yang diungkapkan terhadap total indikator yang dianalisis menggunakan rumus:

$$Tingkat\ Pengungkapan = \frac{\sum Xi}{N} \times 100\%$$

……(i)

∑Xi = Jumlah indikator yang diungkapkan oleh perusahaan

N = Total indikator yang dianalisis

Xi = Skor untuk setiap indikator (1 diungkapkan, dan 0 tidak diungkapkan)

(Rusdiono, 2017) dalam (Hadawia et al., 2025) menyatakan bahwa kualitas pengungkapan kemudian dievaluasi berdasarkan skor yang diperoleh dengan mengacu pada kriteria tingkat kepatuhan sebagai berikut:

0% = *Not Applied* (Tidak Diungkapkan)

1% - 40% = *Limited Disclose* (Diungkapkan Terbatas)

41% - 75% = *Partially Applied* (Diungkapkan Sebagian)

76% - 99% = *Well Applied* (Diungkapkan dengan Baik)

100% = *Fully Applied* (Diungkapkan Sepenuhnya)

Hasil pengungkapan tersebut digunakan untuk menilai tingkat penerapan prinsip materialitas melalui pengungkapan topik material, transparansi melalui tingkat keterbukaan informasi, dan akuntabilitas melalui indikator pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk

**Tabel 1.** Perhitungan Tingkat Pengungkapan Umum dan Topik Material.

| GRI 2 dan 3: Pengungkapan Umum dan Topik Material | | AMI 2025 Skor |
|---|---|---|
| **2: Pengungkapan Umum** | | |
| **Organisasi dan Praktik Pelaporan** | | |
| 2-1 | Rincian organisasi | 1 |
| 2-2 | Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 2-3 | Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan | 1 |
| 2-4 | Penyajian kembali informasi | 1 |
| 2-5 | Penjaminan eksternal | 1 |
| **Aktivitas dan Pekerjaan** | | |
| 2-6 | Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya | 1 |
| 2-7 | Tenaga kerja | 1 |
| 2-8 | Pekerja yang bukan pekerja langsung | 1 |
| **Tata Kelola** | | |
| 2-9 | Struktur dan komposisi tata kelola | 1 |
| 2-10 | Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi | 1 |
| 2-11 | Ketua badan tata kelola tertinggi | 1 |
| 2-12 | Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak | 1 |
| 2-13 | Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak | 1 |
| 2-14 | Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan | 1 |
| 2-15 | Konflik kepentingan | 1 |
| 2-16 | Komunikasi masalah penting | 1 |
| 2-17 | Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi | 1 |
| 2-18 | Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi | 1 |
| 2-19 | Kebijakan remunerasi | 1 |
| 2-20 | Proses untuk menentukan remunerasi | 1 |
| 2-21 | Rasio kompensasi total tahunan | 0 |
| **Strategi, kebijakan, dan praktik** | | |
| 2-22 | Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan | 1 |
| 2-23 | Komitmen kebijakan | 1 |
| 2-24 | Menanamkan komitmen kebijakan | 1 |
| 2-25 | Proses untuk memperbaiki dampak negatif | 1 |
| 2-26 | Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah | 1 |
| 2-27 | Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan | 1 |
| 2-28 | Asosiasi keanggotaan | 1 |
| 2-29 | Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan | 1 |
| 2-30 | Perjanjian perundingan kolektif | 1 |
| **3: Material** | | |
| 3-1 | Proses atau panduan untuk menentukan topik material | 1 |
| 3-2 | Daftar topik material | 1 |
| 3-3 | Manajemen topik material | 1 |
| | **Tabel Skor** | 32 |
| | **Tabel Indikator** | 33 |
| | **Presentase** | 96,97% |

Pada GRI 2 dan GRI 3 (Pengungkapan Umum dan Topik Material), perusahaan memperoleh tingkat pengungkapan sebesar 97% termasuk dalam kategori *Well Applied*

yang menunjukkan bahwa pengungkapan umum perusahaan, tata kelola, strategi keberlanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses penentuan topik material telah dilakukan dengan sangat baik.

**Tabel 2.** Perhitungan Tingkat Pengungkapan Topik Spesifik Ekonomi.

| **GRI 200: Topik Spesifik Ekonomi** | | **AMI 2025 Skor** |
|---|---|---|
| **201: Kinerja Ekonomi** | | |
| 201-1 | Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan | 1 |
| 201-2 | Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim | 1 |
| 201-3 | Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya | 1 |
| 201-4 | Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah | 1 |
| **202: Keberadaan Pasar** | | |
| 201-1 | Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional | 0 |
| 202-2 | Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat | 0 |
| **203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung** | | |
| 203-1 | Investasi infrastruktur dan dukungan layanan | 0 |
| 203-2 | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan | 0 |
| **204: Praktik Pengadaan** | | |
| 204-1 | Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal | 0 |
| **205: Antikorupsi** | | |
| 205-1 | Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi | 0 |
| 205-2 | Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi | 0 |
| 205-3 | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil | 0 |
| **206: Perilaku Antipersaingan** | | |
| 206-1 | Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli | 0 |
| **207: Pajak** | | |
| 207-1 | Pendekatan terhadap pajak | 0 |
| 207-2 | ata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak | 0 |
| 207-3 | Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak | 0 |
| 207-4 | Laporan per negara | 0 |
| | **Total Skor** | 4 |
| | **Total Indikator** | 17 |
| | **Presentase** | 23,53% |

Pada GRI 200 (Topik Spesifik Ekonomi), tingkat pengungkapan hanya mencapai 23,53% sehingga termasuk kategori *Limited Disclose*, karena sebagian besar indikator ekonomi seperti praktik antikorupsi, perpajakan, pengadaan lokal, dan perilaku antipersaingan belum diungkapkan secara optimal.

**Tabel 3.** Perhitungan Tingkat Pengungkapan Topik Spesifik Lingkungan.

| **GRI 300 Topik Spesifik Lingkungan** | | **AMI 2025 Skor** |
|---|---|---|
| **301: Material** | | |
| 301-1 | Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume | 0 |
| 301-2 | Material input dari daur ulang yang digunakan | 0 |
| 301-3 | Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya | 0 |
| **302: Energi** | | |
| 302-1 | Konsumsi energi dalam organisasi | 1 |
| 302-2 | Konsumsi energi di luar organisasi | 1 |
| 302-3 | Intensitas energi | 1 |
| 302-4 | Pengurangan konsumsi energi | 1 |
| 302-5 | Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa | 1 |
| **303: Air dan Efluen** | | |
| 303-1 | Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama | 1 |
| 303-2 | Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air | 1 |
| 303-3 | Pengambilan air | 1 |
| 303-4 | Pembuangan air | 1 |
| 303-5 | Konsumsi air | 1 |
| **304: Keanekaragaman Hayati** | | |
| 304-1 | Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman 8 hayati tinggi di luar kawasan lindung | 0 |
| 304-2 | Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati | 0 |
| 304-3 | Habitat yang dilindungi atau direstorasi | 0 |
| 304-4 | Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi | 0 |
| **305: Emisi** | | |
| 305-1 | Emisi GRK (Cakupan 1) langsung | 1 |
| 305-2 | Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung | 1 |
| 305-3 | Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya | 1 |
| 305-4 | Intensitas emisi GRK | 1 |
| 305-5 | Pengurangan emisi GRK | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 305-6 | Emisi zat perusak ozon (ODS) | 1 |
| 306-7 | Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya | 1 |
| **306: Limbah** | | |
| 306-1 | Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah | 1 |
| 306-2 | Manajemen dampak signifikan terkait limbah | 1 |
| 306-3 | Timbulan limbah | 1 |
| 306-4 | Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir | 1 |
| 306-5 | Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir | 1 |
| **308: Penilaian Lingkungan Pemasok** | | |
| 308-1 | Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan | 0 |
| 308-2 | Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil | 0 |
| | **Total Skor** | 22 |
| | **Total Indikator** | 31 |
| | **Presentase** | 70,97% |

Pada GRI 300 (Topik Spesifik Lingkungan), perusahaan memperoleh tingkat pengungkapan sebesar 70,97% yang termasuk kategori *Partially Applied*, terutama pada aspek energi, emisi, air, dan limbah, meskipun pengungkapan keanekaragaman hayati dan penilaian lingkungan pemasok masih rendah.

**Tabel 4.** Perhitungan Tingkat Pengungkapan Topik Spesifik Sosial.

| **GRI 400: Topik Spesifik Sosial** | | **AMI 2025 Skor** |
|---|---|---|
| **401: Kepegawaian** | | |
| 401-1 | Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan | 1 |
| 401-2 | Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu | 1 |
| 401-3 | Cuti melahirkan | 1 |
| **402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen** | | |
| 402-1 | Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional | 1 |
| **403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja** | | |
| 403-1 | Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja | 1 |
| 403-2 | Pengungkapan, Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi Insiden | 1 |
| 403-3 | Layanan kesehatan kerja | 1 |
| 403-4 | Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja | 1 |
| 403-5 | Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 403-6 | Peningkatan kualitas kesehatan pekerja | 1 |
| 403-7 | Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis | 1 |
| 403-8 | Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja | 1 |
| 403-9 | Kecelakaan kerja | 1 |
| 403-10 | Penyakit Akibat Kerja | 1 |
| **404: Pelatihan dan Pendidikan** | | |
| 404-1 | Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan | 1 |
| 404-2 | Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan | 1 |
| 404-3 | Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier | 1 |
| **405: Keanekaragaman dan Peluang Setara** | | |
| 405-1 | Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan | 1 |
| 405-2 | Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki | 1 |
| **406: Nondiskriminasi** | | |
| 406-1 | Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan | 1 |
| **407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif** | | |
| 407-1 | Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko | 0 |
| **408: Pekerja anak** | | |
| 408-1 | Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak | 0 |
| **409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja** | | |
| 409-1 | Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja | 0 |
| **410: Praktik Keamanan** | | |
| 410-1 | Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia | 0 |
| **411: Hak Masyarakat Adat** | | |
| 411-1 | Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat | 0 |
| **413: Masyarakat Setempat** | | |
| 413-1 | Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan | 1 |
| 413-2 | Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat | 1 |
| **414: Penilaian Sosial Pemasok** | | |
| 414-1 | Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 414-2 | Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil | 0 |
| **415: Kebijakan Publik** | | |
| 415-1 | Kontribusi politik | 0 |
| **416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan** | | |
| 416-1 | Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa | 0 |
| 416-2 | Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa | 0 |
| **417: Pemasaran dan Pelabelan** | | |
| 417-1 | Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa | 0 |
| 417-2 | Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa | 0 |
| 417-3 | Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran | 0 |
| **418: Privasi Pelanggan** | | |
| 418-1 | Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan | 0 |
| | **Total Skor** | 22 |
| | **Total Indikator** | 36 |
| | **Presentase** | 61,11% |

Sementara itu, pada GRI 400 (Topik Spesifik Sosial), tingkat pengungkapan mencapai 61% yang juga termasuk kategori *Partially Applied*, dengan pengungkapan dominan pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan karyawan, keberagaman tenaga kerja, dan hubungan dengan masyarakat sekitar, namun masih terdapat kekurangan pada aspek hak asasi manusia, hak masyarakat adat, pekerja anak, dan privasi pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki komitmen yang cukup baik dalam menerapkan *sustainability reporting* berbasis GRI, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek ekonomi dan sosial

**Tabel 5**. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk 2025.

| Topik Pengungkapan Standar | Total Skor |
|---|---|
| GRI 2 dan 3: Pengungkapan Umum dan Topik Material | 32 |
| GRI 200: Topik Spesifik Ekonomi | 4 |
| GRI 300 Topik Spesifik Lingkungan | 22 |
| GRI 400: Topik Spesifik Sosial | 22 |

$$Tingkat\ Pengungkapan = \frac{80}{117} \times 100\% = 68{,}38\%$$

……(ii)

Berdasarkan hasil analisis isi (*content analysis*) menggunakan pendekatan checklist berbasis GRI Standards 2021, diperoleh bahwa PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (AMI) mengungkapkan 80 indikator dari total 117 indikator yang dianalisis dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 dengan tingkat pengungkapan sebesar 68,38%, sehingga berdasarkan kriteria (Rusdiono, 2017) dalam (Hadawia et al., 2025) termasuk dalam kategori *Partially Applied* atau diungkapkan sebagian.

**Pembahasan**

**Penerapan Aspek Materialitas**

Topik keberlanjutan yang relevan dengan industri pertambangan, seperti emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan air, keselamatan kerja, dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya mengidentifikasi isu yang paling signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta yang memengaruhi keputusan pemangku kepentingan. (GRI, 2024) menegaskan bahwa materialitas merupakan inti dari *sustainability reporting* karena menentukan fokus utama perusahaan dalam menyampaikan informasi keberlanjutan yang benar-benar relevan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (León & Salesa, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keberlanjutan dipengaruhi oleh ketepatan perusahaan dalam menentukan topik material. Dari perspektif teori stakeholder, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya memenuhi ekspektasi stakeholder utama, sebagaimana dijelaskan oleh (Mahajan et al., 2023) bahwa perusahaan harus menciptakan manfaat bagi seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya.

**Penerapan Aspek Transparansi**

Dari sisi transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT AMI telah mengungkapkan informasi keberlanjutan secara cukup komprehensif melalui data kuantitatif dan kualitatif mengenai strategi ESG, pengelolaan emisi, energi, limbah, program sosial, serta kebijakan tata kelola perusahaan. Tingkat pengungkapan sebesar 68,38% menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perusahaan masih berada pada

kategori *Partially Applied*, yang berarti sudah cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi menjadi penting dalam *sustainability report* karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan publik, terutama pada sektor pertambangan yang sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial. (Putera et al., 2026) menjelaskan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam memperkuat legitimasi organisasi karena masyarakat akan menilai perusahaan lebih bertanggung jawab ketika informasi sosial dan lingkungan disampaikan secara terbuka dan konsisten. Dalam perspektif *legitimacy theory*, transparansi berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial serta menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

**Penerapan Aspek Akuntabilitas**

Pada aspek akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT AMI telah mengungkapkan struktur tata kelola, pembagian tanggung jawab manajemen, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pengawasan risiko keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem tata kelola yang formal dan terstruktur, terutama karena aktivitas pertambangan berdampak langsung terhadap lingkungan, keselamatan kerja, dan masyarakat sekitar. (Ika & Falikhtun, 2026) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan proses pertanggungjawaban yang jujur, transparan, dan dapat dipahami publik untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Namun, tingkat pengungkapan yang masih berada pada kategori *Partially Applied* menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya komprehensif, khususnya pada evaluasi dampak jangka panjang, efektivitas pengelolaan lingkungan, dan pengungkapan risiko sosial, sehingga perlu ditingkatkan melalui penyajian informasi yang lebih terukur, konsisten, dan berorientasi jangka panjang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholder dan mempertahankan legitimasi sosial. Penerapan prinsip materialitas, transparansi, dan akuntabilitas pada PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk mencerminkan adanya komitmen perusahaan dalam

mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam tata kelola dan strategi bisnis jangka panjang, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki risiko lingkungan dan sosial yang tinggi. Keberadaan *sustainability report* berbasis GRI Standards 2021 memberikan gambaran bahwa perusahaan telah berupaya menyesuaikan pelaporan keberlanjutan dengan standar global yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, belum optimalnya pengungkapan pada beberapa indikator menunjukkan bahwa implementasi *sustainability reporting* masih memerlukan penyempurnaan agar informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi keberlanjutan perusahaan secara lebih menyeluruh, akurat, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, kualitas laporan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung reputasi perusahaan, pengambilan keputusan stakeholder, serta keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas *sustainability report* dengan memperluas pengungkapan pada indikator ekonomi dan sosial yang masih terbatas serta menyajikan data yang lebih terukur, konsisten, dan mendalam agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat tercermin secara lebih optimal. Perusahaan juga perlu memperkuat keterlibatan stakeholder dalam proses penentuan topik material sehingga isu yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu perusahaan dan menggunakan metode analisis isi berdasarkan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh perusahaan pertambangan secara menyeluruh serta belum menangkap kondisi implementasi secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa perusahaan dalam sektor yang sama, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method, serta mengombinasikan data sekunder dengan wawancara atau observasi langsung agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kualitas *sustainability reporting* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


AMI. (2025). *Laporan Keberlanjutan 2025 | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk*.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*.

GRI. (2024). *GRI Standar*. https://www.globalreporting.org/

Hadawia, S., Kholmi, M., & Rumijati, A. (2025). *Analysis of Sustainability Report Disclosure Quality from Economic , Environmental , and Social Perspectives at PT Petrokimia Gresik*. *6*(2).

Haley, S., Shaffer, M., Sloan, R., Jel, G. M., Sloan, R., Haley, S., Shaffer, M., & Haley, S. (2026). *Do sustainability reports contain financially material information?*

Hanafi, A. A., Lestari, C. W., Suwarno, E. M., & Arifin, L. S. (2025). *ANALISIS PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTS*. *5*(1), 326–343.

Ika, S. R., & Falikhtun. (2026). *Accountability of Mosque Financial Management: A Case Study of Pangeran Diponegoro Mosque, Yogyakarta, Indonesia*. 41–59. https://doi.org/10.32996/jefas

Komor, R., & Grzyb, K. (2023). *Qualitative Content Analysis – A Research in Social Science*. 143–163.

KPMG. (2022). *ESG*. https://kpmg.com/xx/en.html

León, R., & Salesa, A. (2024). Is sustainability reporting disclosing what is relevant? Assessing materiality accuracy in the Spanish telecommunication industry. *Environment, Development and Sustainability*, *26*(8), 21433–21460. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03537-x

Mahajan, R., Marc, W., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, *166*(December 2022), 114104. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104

Martens, W., Ngoc, C., & Bui, M. (2023). *An Exploration of Legitimacy Theory in Accounting Literature*. *10*. https://doi.org/10.4236/oalib.1109713

Perdana, A. Y., Widagdo, A. K., & Ika, S. R. (2025). *Sustainability Reporting in Mining Industry : Does Board Structure and Ownership Matter? 03001*, 1–10.

Putera, R. E., Fathani, A. T., & Lenggogeni, S. (2026). *Unpacking Political Dilemmas in Tourism Governance : Accountability , Transparency and Resource Allocation in Mandalika , Indonesia*. *2011*, 1–25.

Restu, C., & Sungloria, J. (2022). *Analisis Materialitas Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Go Public Consumer Goods 2020*. *19*(2), 90–107.

Nur Qoulan Tsakila, Muhammad Ferri Hardhiansyah, Shifa Dwi Faluvi, & Mochammad Isa Anshori. (2025). Kepemimpinan Kreatif dalam Menciptakan Disrupsi Pasar: Bagaimana Pemimpin Mendobrak Pasar dengan Model Bisnis

Baru. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, *3*(2), 171–191. https://doi.org/10.61132/rimba.v3i2.1749

Irsyad Ilham, Ine Nova Ayu, Siti Hanifatu Sya'adah, Yusriyah Yunita, & Nabila Kania Zahra. (2025). Kepemimpinan Kreatif dalam Menciptakan Disrupsi Pasar: Bagaimana Pemimpin Mendobrak Pasar dengan Model Bisnis Baru. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, *3*(2), 206–214. https://doi.org/10.61132/rimba.v3i2.1753

My Sarah Imran, Anwar Ramli, Siti Hasbiah, Isma Azis Riu, & Rahmat Riwayat Abadi. (2025). Pengaruh Pemasaran Media Sosial terhadap Niat Beli Ulang Melalui Perceived Value Konsumen Produk Skintific : Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, *3*(3), 305–324. https://doi.org/10.61132/rimba.v3i3.2058

Ibnu Farid Abdul Azis, & Meliana Meliana. (2025). Pengaruh Struktur Modal dan Inflasi Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Bank Mandiri Yang Terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi* , *3*(1), 31–39. https://doi.org/10.62951/prosemnasieda.v3i1.180

Triatmi Puji Hastuti. (2025). Peran Literasi Bisnis Digital dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi* , *2*(2), 17–27. https://doi.org/10.62951/prosemnasieda.v2i2.118